



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUHAMMAD RIZKI BAIIDILLAH  
2. Jabatan : KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA INTERNASIONAL KEPABEANAN DAN CUKAI II  
3. NHK : 138587

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	<b>2.728.224.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 271 m2/257 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI	Rp.	2.338.470.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 347 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI	Rp.	389.754.000
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	<b>363.900.000</b>
1. LAINNYA, ELEMENT TROY SEPEDA LIPAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp.	2.900.000
2. MOBIL, BYD M6 Tahun 2024, HASIL SENDIRI	Rp.	340.000.000
3. MOTOR, YAMAHA FAZZIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI	Rp.	21.000.000
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	<b>710.386.431</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	<b>500.000.000</b>
Sub Total	Rp.	<b>4.302.510.431</b>
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	<b>60.000.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	<b>4.242.510.431</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.